

2021

LAPORAN KEUANGAN UAPPAW  
DITJEN  
PENYELENGGARAAN  
HAJI DAN UMRAH  
(Audited)

(025.09.1800)



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



## KATA PENGANTAR

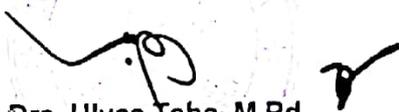
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Paku, Mei 2022  
Kepala



Drs. Ulyas Taha, M.Pd  
NIP. 196805301994031008

## DAFTAR ISI

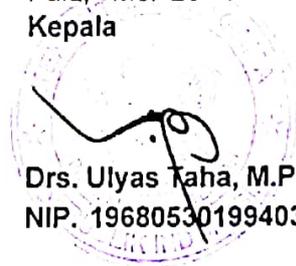
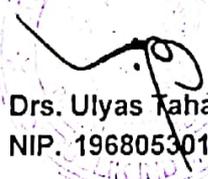
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	18
C.1 Persediaan	
C.2 Persediaan yang Belum Diregister	
C.3 Tanah	
C.4 Peralatan dan Mesin	
C.5 Gedung dan Bangunan	
C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.8 Aset Tetap Lainnya	
C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.11 Aset Tak Berwujud	
C.12 Aset Lain-lain	
C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.14 Ekuitas	
C.15 Catatan Penting Lainnya neraca	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	24
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	
D.6 Beban Perjalanan Dinas	
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.11 Pos Luar Biasa	
D.12 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LO	
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5 Transaksi Antar Entitas	
E.6 Ekuitas Akhir	
VI. Lampiran dan Daftar	

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palu, Mei 2022  
Kepala



Drs. Ulyas Taha, M.Pd  
NIP. 196805301994031008

## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76,031,989 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp76,031,989 atau mencapai 417.99 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp18,190,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22,779,113,598 atau mencapai 99.47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp22,901,224,000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp98,955,654,786 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1,127,000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp98,954,527,786 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp98,955,654,786

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp74,325,099 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13,072,623,258 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-12,998,298,159, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1,706,890 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-12,996,591,269.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp89,218,042,051, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-12,996,591,269 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar - 61,825,500 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 22,796,029,504 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp98,955,654,786

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

U R A I A N	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	18,190,000	76,031,989	417.99	324,989,294
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>18,190,000</b>	<b>76,031,989</b>	<b>417.99</b>	<b>324,989,294</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	8,071,107,000	8,037,565,357	99.58	7,683,469,680
Belanja Barang	B.2.2	4,177,907,000	4,133,724,778	98.94	4,555,760,106
Belanja Modal	B.2.3	10,652,210,000	10,607,823,463	99.58	4,118,924,900
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>22,901,224,000</b>	<b>22,779,113,598</b>	<b>99.47</b>	<b>16,358,154,686</b>

**NERACA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	1,127,000	1,008,000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1,127,000</b>	<b>1,008,000</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.3	49,957,693,000	49,917,693,000
Peralatan dan Mesin	C.4	5,025,929,997	3,422,547,602
Gedung dan Bangunan	C.5	20,801,864,382	11,806,300,919
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6	1,041,768,000	1,041,768,000
Aset Tetap Lainnya	C.7	42,000,000	42,000,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.8	28,516,424,557	28,516,424,557
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(6,431,152,150)	(5,532,700,947)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>98,954,527,786</b>	<b>89,214,033,131</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.10	43,056,684	43,056,684
Aset Lain-lain	C.11	25,592,100	25,592,100
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(68,648,784)	(65,647,864)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>3,000,920</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>98,955,654,786</b>	<b>89,218,042,051</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.13	98,955,654,786	89,218,042,051
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>98,955,654,786</b>	<b>89,218,042,051</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>98,955,654,786</b>	<b>89,218,042,051</b>

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	74,325,099	319,970,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>74,325,099</b>	<b>319,970,000</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	8,037,565,357	7,683,469,680
Beban Persediaan	D.3	101,735,500	914,071,280
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,916,360,205	1,955,153,721
Beban Pemeliharaan	D.5	362,757,021	223,539,729
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,752,753,052	1,948,351,376
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	901,452,123	583,905,890
<b>Jumlah Beban</b>		<b>13,072,623,258</b>	<b>13,308,491,676</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(12,998,298,159)</b>	<b>(12,988,521,676)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	1,706,890	487,488,294
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>1,706,890</b>	<b>487,488,294</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(12,996,591,269)</b>	<b>(12,501,033,382)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.9		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(12,996,591,269)</b>	<b>(12,501,033,382)</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2021	2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>89,218,042,051</b>	<b>84,535,860,041</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(12,996,591,269)</b>	<b>(12,501,033,382)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	<b>(61,825,500)</b>	<b>1,078,693,000</b>
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	(61,825,500)	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	1,078,693,000
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>(61,825,500)</b>	<b>1,078,693,000</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	22,796,029,504	16,104,522,392
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		9,737,612,735	4,682,182,010
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>98,955,654,786</b>	<b>89,218,042,051</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. pembinaan kerukunan umat beragama;
6. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen dengan visi dan misinya, yaitu:

Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah adalah, "Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Tengah yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang Berkualitas dan Akuntabel
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya

## A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan 2021 periode 31 Desember ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 2021 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

### Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wilayah	Satker	Jumah dan Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	025.09	Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulteng		KD			1
2	025.09	Kantor Kemenag Kota Palu		KD			1
3	025.09	Kantor Kemenag Kab. Donggala		KD			1
4	025.09	Kantor Kemenag Kab. Sigi		KD			1
5	025.09	Kantor Kemenag Kab. Parigi Moutong		KD			1
6	025.09	Kantor Kemenag Kab. Poso		KD			1
7	025.09	Kantor Kemenag Kab. Banggai		KD			1
8	025.09	Kantor Kemenag Kab. Banggai Laut		KD			1
9	025.09	Kantor Kemenag Kab. Bangkep		KD			1
10	025.09	Kantor Kemenag Kab. Buol		KD			1
11	025.09	Kantor Kemenag Kab. Toli-toli		KD			1
12	025.09	Kantor Kemenag Kab. Tojo Una una		KD			1
13	025.09	Kantor Kemenag Kab. Morowali		KD			1
14	025.09	Kantor Kemenag Kab. Morowali Utara		KD			1
<b>Jumlah</b>							<b>14</b>

## A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### Belanja

#### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

### Beban

#### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### Aset

#### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

### Aset Lancar

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
<b>Lancar</b>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

### **Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

<b>Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **Kewajiban**

##### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **Ekuitas**

##### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2021	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	18,190,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>18,190,000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	8,001,792,000	8,071,107,000
Belanja Barang	4,186,246,000	4,177,907,000
Belanja Modal	9,782,552,000	10,652,210,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>21,970,590,000</b>	<b>22,901,224,000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp76,031,989

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76,031,989 atau mencapai 417.99 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18,190,000. Pendapatan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp76,031,989. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,190,000	76,031,989	417.99
<b>Jumlah</b>	<b>18,190,000</b>	<b>76,031,989</b>	<b>417.99</b>

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 76.60 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	76,031,989	324,989,294	(76.60)
<b>Jumlah</b>	<b>76,031,989</b>	<b>324,989,294</b>	<b>(76.60)</b>

### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing- masing sebesar Rp76,031,989 dan Rp324,989,294. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami penurunan sebesar 76.60 dari TA 2020 . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	76,031,989	324,989,294	(76.60)
<b>Jumlah</b>	<b>76,031,989</b>	<b>324,989,294</b>	<b>(76.60)</b>

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	15,940,000	319,970,000	(95.02)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	706,890	1,819,294	(61.14)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	58,385,099	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1,000,000	2,000,000	(50.00)
Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penvelenggaraan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>76,031,989</b>	<b>324,989,294</b>	<b>(76.60)</b>

## B.2 Belanja

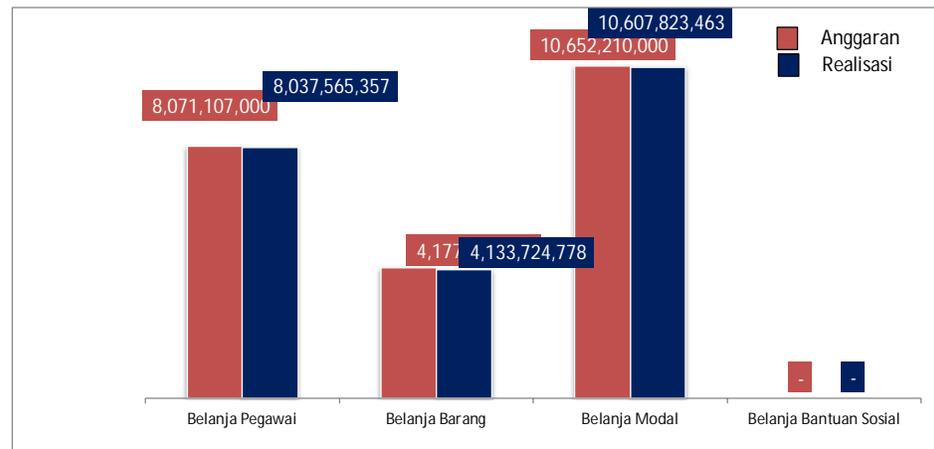
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp22,779,113,598 atau 99.47 % dari anggaran belanja sebesar Rp.22,901,224,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2021

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% tnp Angg
Belanja Pegawai	8,071,107,000	8,037,565,357	99.58
Belanja Barang	4,177,907,000	4,133,724,778	98.94
Belanja Modal	10,652,210,000	10,607,823,463	99.58
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22,901,224,000</b>	<b>22,779,113,598</b>	<b>99.47</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

### Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 39.25% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

### Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	8,037,565,357	7,683,469,680	4.61
Belanja Barang	4,133,724,778	4,555,760,106	(9.26)
Belanja Modal	10,607,823,463	4,118,924,900	157.54
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22,779,113,598</b>	<b>16,358,154,686</b>	<b>39.25</b>

Realisasi Belanja  
Pegawai  
Rp8,037,565,357

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8,037,565,357 dan Rp7,683,469,680. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4.61 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan

#### Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3,610,756,500	3,447,660,700	4.73
Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,221	46,378	8.29
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	236,880,660	231,467,910	2.34
Belanja Tunj. Anak PNS	83,909,284	81,352,388	3.14
Belanja Tunj. Struktural PNS	130,340,000	133,580,000	(2.43)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	41,060,000	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	5,446,051	5,553,889	(1.94)
Belanja Tunj. Beras PNS	212,190,600	178,732,560	18.72
Belanja Uang Makan PNS	593,096,000	581,627,000	1.97
Belanja Tunjangan Umum PNS	148,980,000	146,220,000	1.89
Belanja Uang Lembur	39,366,000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Keg	2,947,910,169	2,879,355,213	2.38
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>8,049,985,485</b>	<b>7,685,596,038</b>	<b>4.74</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	12,420,128	2,126,358	484.10
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8,037,565,357</b>	<b>7,683,469,680</b>	<b>4.61</b>

Realisasi Belanja  
Barang  
Rp4,133,724,778

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4,133,724,778 dan Rp4,555,760,106. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 9.26% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh

#### Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	1,373,058,214	1,156,822,851	18.69
Belanja Barang Non Operasional	203,808,000	421,578,400	(51.66)
Belanja Barang Persediaan Barang	101,854,500	161,154,280	(36.80)
Belanja Jasa	343,737,566	374,892,470	(8.31)
Belanja Pemeliharaan	362,757,021	493,998,029	(26.57)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,764,847,497	1,986,885,618	(11.18)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4,150,062,798</b>	<b>4,595,331,648</b>	<b>(9.69)</b>
Pengembalian Belanja	16,338,020	39,571,542	(58.71)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4,133,724,778</b>	<b>4,555,760,106</b>	<b>(9.26)</b>

**Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19**

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp272,002,000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp271,248,450 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2021*

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	242,002,000	241,248,450	99.69
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	20,000,000	100.00
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	10,000,000	10,000,000	100.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>272,002,000</b>	<b>271,248,450</b>	<b>99.72</b>

*Realisasi Belanja Modal  
Rp10,607,823,463*

**B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10,607,823,463 dan Rp4,118,924,900. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 157.54% dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh .

*Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,612,260,000	831,474,000	93.90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,995,563,463	3,287,450,900	173.63
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>10,607,823,463</b>	<b>4,118,924,900</b>	<b>157.54</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10,607,823,463</b>	<b>4,118,924,900</b>	<b>157.54</b>

Realisasi Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp1,612,260,000

### B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1,612,260,000 dan Rp831,474,000, mengalami kenaikan sebesar 94.44 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh .

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2021 dan*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,612,260,000	829,194,000	94.44
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1,612,260,000</b>	<b>829,194,000</b>	<b>94.44</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,612,260,000</b>	<b>829,194,000</b>	<b>94.44</b>

Realisasi Belanja Modal  
Gedung dan Bangunan  
Rp8,995,563,463

### B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8,995,563,463 dan Rp3,287,450,900 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 173.63% dibandingkan Realisasi TA 2020. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,995,563,463	3,287,450,900	173.63
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8,995,563,463</b>	<b>3,287,450,900</b>	<b>173.63</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8,995,563,463</b>	<b>3,287,450,900</b>	<b>173.63</b>

### B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Terdapat pagu minus pada belanja pegawai dan belanja barang di beberapa satker, dan penyelesaian revisi dalam tahap proses yang sampai pada tanggal pelaporan belum disetujui. Adapun rincian satker yang terdapat pagu minus ada pada lampiran.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Kode satker	Nama Satker	Jumlah
1	181219	Kantor Kementerian Agama Kab. Sigi	-
2	418432	Kantor Kementerian Agama Kab. Morowali Utara	-
3	418433	Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Laut	-
4	419325	Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah	-
5	419333	Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli	-
6	419356	Kantor Kementerian Agama Kab. Poso	-
7	419364	Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai	-
8	445363	Kantor Kementerian Agama Kab. Tojo unauna	-
9	635368	Kantor Kementerian Agama Kab. Buol	-
10	635447	Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan	-
11	653864	Kantor Kementerian Agama Kab. Parigi Moutong	-
<b>Jumlah</b>			-

Persediaan  
Rp1,127,000

#### C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1,127,000 dan Rp1,008,000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Barang Konsumsi	1,127,000	1,008,000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,127,000</b>	<b>1,008,000</b>

Tanah  
Rp49,957,693,000

#### C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp49,957,693,000 dan Rp49,917,693,000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>49,917,693,000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
Transfer Keluar	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>49,917,693,000</b>

Peralatan dan Mesin  
Rp5,025,929,997

#### C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp5,025,929,997 dan Rp3,422,547,602. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dielaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>3,422,547,602</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	1,098,616,000
Transfer Masuk	668,387,830
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	513,644,000
Reklasifikasi Masuk	451,818,500
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
Transfer Keluar	615,439,935
Reklasifikasi Keluar	513,644,000
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>5,025,929,997</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(2,926,368,063)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>2,099,561,934</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp20,801,864,382

#### C.5 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20,801,864,382 dan Rp11,806,300,919. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>11,806,300,919</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	8,551,959,113
Pengembangan Nilai Aset	64,992,000
Pengembangan Melalui KDP	378,612,350
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>20,801,864,382</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(2,671,369,687)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>18,130,494,695</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp1,041,768,000

### C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.1,041,768,000 dan Rp.1,041,768,000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>1,041,768,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
<b>Saldo per</b>	<b>1,041,768,000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.	(833,414,400)
<b>Nilai Buku per</b>	<b>208,353,600</b>

Aset Tetap Lainnya  
Rp42,000,000

### C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.42,000,000 dan Rp.42,000,000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>42,000,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>42,000,000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>42,000,000</b>

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp28,516,424,557

### C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.28,516,424,557 dan Rp.28,516,424,557. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>28,516,424,557</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>28,516,424,557</b>

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp6,431,152,150

### C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp6,431,152,150 dan Rp5,532,700,947. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2021*

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,025,929,997	(2,926,368,063)	2,099,561,934
2	Gedung dan Bangunan	20,801,864,382	(2,671,369,687)	18,130,494,695
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,041,768,000	(833,414,400)	208,353,600
4	Aset Tetap Lainnya	42,000,000	-	42,000,000
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>26,911,562,379</b>	<b>(6,431,152,150)</b>	<b>20,480,410,229</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud  
Rp43,056,684

### C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp43,056,684 dan Rp43,056,684. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2021</b>	<b>43,056,684</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2021</b>	<b>43,056,684</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(43,056,684)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>

Aset Lain-lain  
Rp25,592,100

### C.11 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp25,592,100 dan Rp25,592,100. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>	<b>25,592,100</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>25,592,100</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(25,592,100)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya 68,648,784

### C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp68,648,784 dan Rp65,647,864. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	43,056,684	(43,056,684)	-
Aset Lain-lain	25,592,100	(25,592,100)	-
-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>68,648,784</b>	<b>(68,648,784)</b>	<b>-</b>

Ekuitas  
Rp98,955,654,786

### C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp98,955,654,786. dan Rp89,218,042,051. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### C. 14 Catatan Penting Lainnya neraca

Konstruksi dalam pengerjaan pada Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah senilai Rp.28.526.424.557,- adalah revitalisasi asrama haji transit Palu tahun 2017 yang sampai tanggal pelaporan semester II 2021 belum selesai pembangunannya.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp74,325,099

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp74,325,099 dan Rp319,970,000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 76.77. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	-	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan	15,940,000	319,970,000.00	(95.02)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>74,325,099.00</b>	<b>319,970,000.00</b>	<b>(76.77)</b>

Beban Pegawai  
Rp8,037,565,357

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8,037,565,357 dan Rp7,683,469,680.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 4.61 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	3,610,756,500	3,447,660,700	4.73
Beban Pembulatan Gaji PNS	50,173	45,680	9.84
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	236,880,660	231,467,910	2.34
Beban Tunj. Anak PNS	83,909,284	81,352,388	3.14
Beban Tunj. Struktural PNS	130,340,000	133,580,000	(2.43)
Beban Tunj. Fungsional PNS	41,060,000	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	5,446,051	5,553,889	(1.94)
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8,037,565,357</b>	<b>7,683,469,680</b>	<b>4.61</b>

Beban Persediaan  
Rp101,735,500

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp101,735,500 dan Rp914,071,280

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 88.87 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh . Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	101,349,500	913,821,280	(88.91)
Beban Persediaan bahan baku	386,000	250,000	54.40
	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>101,735,500.00</b>	<b>914,071,280</b>	<b>(88.87)</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp1,916,360,205

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,916,360,205 dan Rp1,955,153,721.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1.98 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	334,082,189	107,097,150	211.94
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	780,417,000	718,057,500	8.68
Beban Barang Operasional Lainnya	16,887,000	44,879,500	(62.37)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	241,248,450	286,788,701	(15.88)
Beban Bahan	159,108,000	320,924,650	(50.42)
Beban Honor Output Kegiatan	9,700,000	64,320,000	(84.92)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15,000,000	15,000,000	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	20,733,750	(3.54)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,837,000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,916,360,205</b>	<b>1,955,153,721.00</b>	<b>(1.98)</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp362,757,021

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp362,757,021 dan Rp223,539,729.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 62.28 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	227,957,021	220,785,729	3.25
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	2,754,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134,800,000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>362,757,021</b>	<b>223,539,729</b>	<b>62.28</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp1,752,753,052

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,752,753,052 dan Rp1,948,351,376

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 10.04 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	1,419,296,908	1,077,575,587	31.71
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	9,500,000	(74.74)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	321,056,144	732,177,789	(56.15)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pander	10,000,000	129,098,000	(92.25)
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,752,753,052.00</b>	<b>1,948,351,376</b>	<b>(10.04)</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp901,452,123

#### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp901,452,123 dan Rp583,905,890.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	419,619,431	225,956,799	85.71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	374,654,972	248,478,340	50.78
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	104,176,800	104,176,800	-
Beban Amortisasi Lisensi	3,000,920	3,718,531	(19.30)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang	-	1,575,420	(100.00)
	-	-	-
<b>Jumah Penyusutan</b>	<b>901,452,123</b>	<b>583,905,890</b>	<b>54.38</b>
	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>901,452,123</b>	<b>583,905,890</b>	<b>54.38</b>

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
Rp1,706,890

#### D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,706,890 dan Rp487,488,294.

*Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	706,890	1,819,294.00	(61.14)
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun	1,000,000	2,000,000.00	(50.00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun	-	1,200,000.00	(100.00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(31,000.00)	(100)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	482,500,000.00	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>1,706,890.00</b>	<b>487,488,294</b>	<b>(99.65)</b>

**D.9 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19**

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

*Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2021 dan 2020*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>REALISASI T.A.2021</b>	<b>REALISASI T.A. 2020</b>	<b>%</b>
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	241,248,450	286,788,701	(15.88)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,000,000	20,733,750	(3.54)
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-	-	13,837,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	10,000,000	129,098,000	(92.25)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>271,248,450.00</b>	<b>450,457,451</b>	<b>(39.78)</b>

**D.10 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional**

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal  
Rp89,218,042,051.00

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.89,218,042,051.00 dan Rp.84,535,860,041.00

Defisit LO Rp.-  
12,996,591,269.00

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-12,996,591,269.00 dan Rp.-12,501,033,382.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-61,825,500 dan Rp.1,078,693,000 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai  
Aset Rp.0.00

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0.00

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp-  
61,825,500.00

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-61,825,500 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	(61,825,500)
	-
<b>Jumlah</b>	<b>(61,825,500.0)</b>

Selisih Revaluasi  
Aset Rp.0.00

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.1,078,693,000.00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan

##### Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

##### Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.22,796,029,504 dan Rp.16,104,522,392. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

##### Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	22,779,113,598
Diterima dari Entitas Lain	(76,031,989)
Transfer Keluar	(556,944,545)
Transfer Masuk	609,892,440
Pengesahan Hibah Langsung	40,000,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22,796,029,504</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

##### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 22,779,113,598, sedangkan DDEL sebesar Rp 76,031,989

### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp-556,944,545 terdiri dari :

#### Rincian Transfer Keluar Tahun 2021

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	025.09.181219	(26,278,053)
-	025.09.418432	(4,802,875)
-	025.09.418433	(46,706,624)
-	025.09.419333	(46,706,624)
-	025.09.419340	(46,706,624)
-	025.09.419356	(46,706,624)
-	025.09.419364	(46,706,624)
<b>Jumlah</b>		<b>(264,614,048)</b>

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp609,892,440 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>#REF!</b>

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2021

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		<b>-</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir  
Rp98,955,654,786

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.98,955,654,786.00 dan Rp.89,218,042,051.00.

### E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas